

**KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM
PANDEMIK COVID-19 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN****Sanusi***E-mail : sanusisanusi45@gmail.com***Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Uniska Banjarmasin****ABSTRACT**

The trend of the number of Covid-19 sufferers is increasing day by day, on the other hand the government with various programs has been very maximal, how can together with the people be free from this pandemic. In South Kalimantan, a province where the percentage of people exposed to Covid-19 is 0.17%, almost 3 times the national average, only 0.09%. The level of compliance and understanding of health protocols that are not understood by the community is because of ineffective handling communication.

This study used observational methods and purposive deep interviews with informants to 60 Neighborhood Association who distributed cash social assistance to people affected by Covid-19 in South Kalimantan. Other data was collected through a publication conducted by the Covid-19 Emergency Alert Task Force for South Kalimantan Province from March 30, 2020 to September 1, 2020.

The communication program does not run smoothly between policy holders and the community. Part of the coordination between the central and local governments is not going well. The constraint on the number of Indonesian people is very large and quite wide spread, causing different perceptions, some even are antipathy to government policies. The cooperation and involvement of community role models who have many followers is less clear. Awareness of togetherness to maintain mutual health and the spread of the Covid-19 virus has not been evenly distributed, as well as various terms that are not easily understood properly, are difficult to apply. Likewise, the provision of cash social assistance, which was not balanced with education on the importance of maintaining health protocols and various sanctions, actually resulted in a counterproductive situation. Various communication programs have not fully been able to change people's behavior, they need to be evaluated immediately so that they are more effective in handling Covid-19.

Keywords: communication, behavior change in the Covid-19 pandemic community, South Kalimantan.

PENDAHULUAN

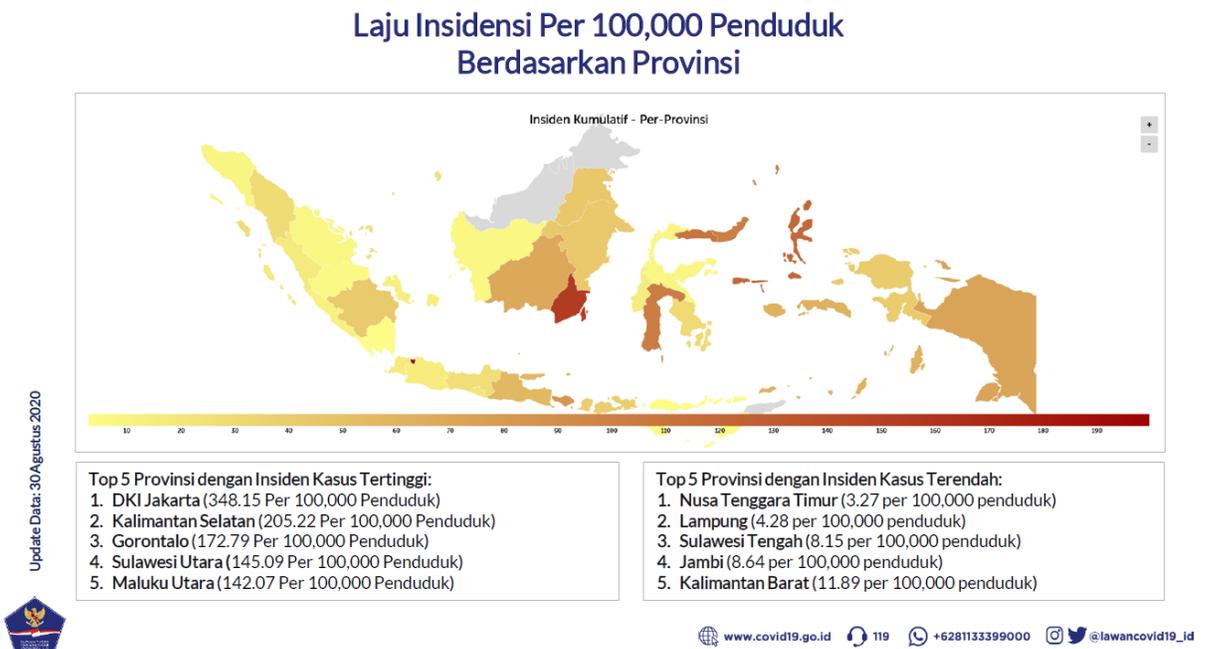
Sampai sekarang belum ada ahli atau pihak yang bisa memprediksikan kapan Covid-19 akan berakhir. Pandemi penyakit yang sangat luar biasa menjadikan banyak masyarakat di dunia mendapatkan ketidakpastian akan jaminan kesehatannya. Sejak 11 Maret 2020, Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, telah menetapkan Wabah virus corona Covid-19 menjadi pandemi global (Internet, 2 April 2020). Tidak ada negara di dunia yang merasa aman dari pandemi ini. Di Indonesia sejak 13 April 2020, dinyatakan sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). (diakses di Internet 28 April 2020)

Di Indonesia kecenderungan jumlah penderita Covid-19 belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Laporan terakhir dari Gugus Covid-19, TV One 8 September 2020, jam 06:46 WIB, penderita positif Covid-19 sudah mencapai 196.989 orang. Bahkan menurut yang diberitakan oleh *tribunnews.com* tanggal 20 Juli 2020, bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia, akan berlanjut dan kemungkinan berakhir sampai tahun 2021:

“Guru Besar Statistika UGM Dedi Rosadi mengungkapkan prediksi terbaru timnya terkait akhir pandemi virus corona di Indonesia. Riset perhitungan prediksi ini dilakukan Dedi bersama rekannya alumni FMIPA UGM Joko Kristadi dan Fidelis Diponegoro. Hasilnya, berdasarkan tracking data terakhir dan menggunakan berbagai pendekatan pemodelan data-driven (berbasis pergerakan data), terdapat kenaikan nilai proyeksi kasus positif di akhir pandemi yang cukup signifikan dibanding estimasi yang disampaikan sebelumnya pada Juni 2020 yang lalu. Prediksi paling optimistis diperoleh dengan menggunakan model hybrid kompartemen SIR-Regresi-runtun-waktu dan diperkirakan pandemi akan berakhir di awal November 2020 dengan total kasus positif sekitar 112 ribu penderita. Sementara secara terpisah riset juga menggunakan model Probabilistic Data Driven Model Covid-19 Indonesia. Hasilnya diperoleh pandemi akan berpuncak akhir Juli sampai akhir Agustus

2020 dan berakhir pada akhir Februari 2021 dengan estimasi total kasus positif sekitar 227 ribu penderita” (*tribunnews.com*. diakses 25 Juli 2020)

Di Kalimantan Selatan, termasuk provinsi yang jumlah penderita positif Covid-19 cukup tinggi. Secara nasional Provinsi Kalimantan Selatan cukup mengkhawatirkan, menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta. Sampai akhir Agustus 2020 sangat tinggi kasusnya, seperti tergambar dari laporan Gugus Covid-19 (Covid-19.go.id), dilihat dari laju insiden per 100.000 penduduk, sebagaimana gambar tabel berikut ini :



Sumber : Update data 30 Agustus 2020 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, www.covid19.go.id

Posisi Provinsi Kalimantan Selatan menempati urutan kedua, setelah DKI Jakarta. Masyarakat seperti terlalu meremehkan mengenai perkembangan Covid-19 ini. Ada kemungkinan, sebagian sudah terlalu jenuh karena terlalu banyak aturan, protokol, dan beberapa istilah yang terkadang tidak dipahami dengan baik pengertiannya. Akhirnya masyarakat sebagian menerjemahkan sendiri apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk bersama-sama menjaga kesehatan tersebut.

Berbagai ancaman hukuman dan denda sudah diterapkan, tapi masyarakat tidak sepenuhnya bisa patuh. Seolah-olah rasa takut akan wabah yang mematikan ini, sudah habis dan kehilangan “rasa”.

Pemberitaan televisi, TV One menyampaikan bahwa DKI Jakarta sudah terkumpul lebih Rp.4 miliar denda pelanggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), tapi pelanggaran terus berjalan. TVRI Kalimantan Selatan, Kamis 16 April jam 17:35, memberitakan, bahwa sebagian pedagang di Pasar Marabahan, ibukota Kabupaten Barito Kuala, lebih baik tidak berjualan (menghindar) selama 2-3 hari daripada mengikuti anjuran untuk ikut program “*rapid test*”, karena akan sangat rugi kalau ternyata hasilnya “reaktif”, maka akan tidak bisa berdagang 14 hari, akan rugi, dalam rangka isolasi mandiri. Berbagai tindakan agar membuat efek jera, antara lain : diminta *push-off* untuk anak muda, berjoget dipinggir jalan bagi yang tua, menyapu jalanan, dimasukkan ke dalam keranda mayat, dimasukkan ke dalam mobil ambulans duduk samping keranda mayat. pemberlakuan jam malam, tetapi pelanggaran tetap terjadi dan penderita Covid-19 tetap bertambah.

Berbagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tentang protokol Kesehatan, antara lain: terjadi perebutan mayat mau dikubur dengan protokol kesehatan yang dinyatakan meninggal karena terinfeksi Covid-19, walaupun nanti semua orang yang terlibat akan di *rapid test*, dan kemungkinan besar akan reaktif virus, dan sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Sebagian juga ada masyarakat yang menolak wilayahnya dijadikan lahan pemakaman korban Covid-19, walaupun di tempat itu memang tanah yang dimiliki pemerintah dan penggunaannya sudah dipertimbangkan tidak akan mengganggu kesehatan masyarakat.

Berbagai reaksi penolakan dan ketidakpatuhan masyarakat tersebut, selain karena tuntutan ekonomi, juga karena kebiasaan/budaya yang terganggu, dan bahkan karena komunikasi yang terhambat.

Data peningkatan penderita Covid-19 di Kalimantan Selatan, sangat cepat bertambah, tetapi sebagian masyarakat kurang memahami dengan baik, kemungkinan karena tidak ada keluarganya atau orang terdekat yang menjadi korban penularan virus tersebut, sehingga semuanya itu dianggap hal biasa. Gambaran peningkatan pertambahan penderita, dari tanggal 30 Maret 2020 sampai 1 September 2020, selama 5 bulan sudah mencapai 8.359 orang, sebagaimana dalam tabel rangkuman perkembangan Covid-19 berikut ini :

Tabel 1 Rangkuman Perkembangan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggal Catatan	Lama (hari)	Penambahan (orang)	
		Terkonfirmasi	Meninggal
30 Maret 2020	-	5	-
11 April 2020	11 hari	+ 24 = 29	4
15 April 2020	4 hari	+ 20 = 49	+ 3 = 7
21 April 2020	6 hari	+ 50 = 99	+ 0 = 7
02 Mei 2020	11 hari	+ 80 = 179	+ 3 = 10
14 Mei 2020	12 hari	+ 98 = 287	+ 20 = 30
22 Mei 2020	8 hari	+ 375 = 572	+ 28 = 58
29 Mei 2020	7 hari	+ 321 = 893	+ 26 = 74
11 Juni 2020	12 hari	+ 741 = 1.634	+ 38 = 112
27 Juni 2020	16 hari	+ 1.296 = 2.930	+ 66 = 178
06 Juli 2020	9 hari	+ 698 = 3.628	+ 25 = 203
23 Juli 2020	17 hari	+1.704 = 5.332	+ 60 = 263
01 Agustus 2020	8 hari	+ 828 = 6.160	+ 33 = 296
11 Agustus 2020	10 hari	+ 676 = 6.836	+ 15 = 311
19 Agustus 2020	8 hari	+ 527 = 7.363	+ 16 = 327
01 September 2020	12 hari	+ 996 = 8.359	+ 30 = 357

Data : Diolah dari informasi Satgas Siaga Darurat Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan.

Data tersebut di atas, berarti rata-rata setiap hari terjadi peningkatan penderita Covid-19 sebanyak 41 orang. Kalau dihitung secara persentase dari jumlah penduduk, maka di Kalimantan Selatan (4.303.979 jiwa) = 0,19 %. Hampir 3 kali lipat diatas rata-rata nasional (271 juta jiwa) dengan penderita 196.989 = 0,07 %.

Di Kalimantan Selatan, penyebaran Covid-19 sangat pesat, walaupun sebenarnya pemerintah daerah sudah cukup tanggap, sejak tercatat 49 penderita, Kemenkes sudah setuju dan dilaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Banjarmasin mulai 24 April 2020, dan 16 Mei 2020 dilanjutkan di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Batola.

Pada tanggal 19 April 2020, [Kementerian Kesehatan](#) menyetujui [pembatasan sosial berskala besar](#) (PSBB) untuk [Kota Banjarmasin](#) yang rencananya akan diterapkan mulai awal Ramadhan 1441 H atau 24 April 2020. (Kemenkes diakses 1 Mei 2020)

Pada hari Sabtu, 16 Mei 2020. [Kota Banjarbaru](#), [Kabupaten Banjar](#), dan [Kabupaten Barito Kuala](#) akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak mulai pukul 00.01 WITA setelah pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI pada 11 Mei 2020. (diakses 19 Mei 2020)

Pendekatan komunikasi yang efektif dan lebih humanis, dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, diyakini bisa menyelesaikan berbagai masalah, termasuk edukasi masyarakat agar patuh protokol kesehatan dan menaati peraturan kemasyarakatan lainnya.

Penelitian ini mengungkapkan kenyataan di lapangan terhadap masyarakat yang diberikan Bantuan Sosial Tunai akibat menurun penghasilan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemerintah sudah memberikan dana yang sangat besar untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19, tetapi kepatuhan masyarakatnya terasa tidak sebanding dengan program bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *observasional* dan *deep interview* kepada informan terpilih. Informan dipilih secara *purposive* kepada ketua Rukun Tetangga yang menyalurkan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19 berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumpulan data lapangan menggunakan

kuesioner yang dibantu oleh mahasiswa semester IV Pendidikan D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Data lainnya dikumpulkan melalui publikasi yang dilakukan oleh Satgas Siaga Darurat Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan selama 30 Maret 2020 sampai dengan 1 September 2020.

Selain itu juga, peneliti mengumpulkan berbagai kebijakan dan berbagai upaya pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19, serta mengikuti berbagai pemberitaan berkaitan dengan perilaku masyarakat dan berkaitan dengan pengobatannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat tidak bisa beraktivitas secara normal, menyebabkan putaran ekonomi dan kebutuhan akan kecukupan pangan semakin menurun. Mayoritas penerima Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah untuk membantu ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak menurun pendapatan akibat pandemik Covid-19. Setelah mendapatkan dana untuk keperluan hidup sehari-hari, justru mereka umumnya belanja ke pasar, perilaku belanja ke pasar ini dan bahkan sebagian tidak memakai masker, akan menyebabkan virus Covid-19 semakin gampang menyebar dan bahkan membentuk *cluster* baru, yaitu pasar-pasar tempat belanja masyarakat tersebut.

Sebagian kecil Ketua RT (Rumah Tangga) tidak menyampaikan pesan agar tetap menaati protokol kesehatan untuk lebih banyak diam di rumah dan menghindari kerumunan orang banyak terutama pasar. Masyarakat yang sudah diberi dana untuk bantuan keperluan rumah tangga, umumnya merasakan suatu kebebasan untuk memenuhi keperluan hidupnya, kebebasan tidak merasa perlu memakai masker, bahkan sebagian menganggap masalah penyakit adalah hal biasa, bisa menimpa siapa saja dan kapan saja.

Dari sebaran 60 petugas lapangan di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian data kurang valid karena Ketua RT kurang kondusif dan keterbatasan akibat ruang gerak petugas lapangan terbatas, maka data diperoleh sebanyak 42 jawaban. Jawaban mengenai adanya imbauan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker serta menghindari kerumunan orang banyak, sebaran penerima Bantuan Sosial Tunai, bagaimana kesiapan masyarakat untuk mengikuti program “*New Normal*”, secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. Respon Masyarakat Setelah diberikan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19

NO	Alamat Ketua Rumah Tangga	Pesan tetap di rumah	Penerima Bantuan Sosial Tunai	Tanggapan Masyarakat dan Kesiapan Mengikuti Imbauan “ <i>New Normal</i> ”
A16	Kel. Sungai Tabukan Desa Nelayan RT 05	Ya	Semua dapat kecuali 4 PNS dan 3 PKH	Ramai ke pasar dapat rezeki mendadak, habis persediaan. Tanpa masker dan anggap remeh Covid-19. Belum siap <i>New Normal</i> . Tingkat kesadaran dan masih ada tambahan PDP.
A8	Desa Semangat Dalam RT 3	Ya	Semua kecuali PNS dan swasta dan 2 PKH	Masyarakat sudah sadar bermasker.
B41	Hambuku Pasar RT 3 Sungai Pandan HSU	Ya, tapi imbauan tanpa sanksi	Semua dapat kecuali PNS, pensiunan dan aparat desa, tapi istrinya dapat	Masyarakat kita konsumtif, dapat uang berpikir untuk belanja saja. Belum siap, tergantung pemerintahnya juga.
A2	RT 12 Tambang Ulang Tanah Laut	Ya	Sekitar 8 orang, kecuali PNS dan karyawan swasta.	Keluar rumah bosan akan situasi yang ada. Keadaan <i>New Normal</i> merupakan tuntutan untuk memenuhi pergerakan ekonomi, tapi harus berhati-hati karena ada negara lain yang justru kurang berhasil.

B11	RT. 29 Kel.Kuripan Kota Banjarmasin	Ya	Semua dapat kecuali 10 PNS dan 12 PKH	Ramai beli pakaian dan peralatan rumah. Sebagian tidak taat masker dan <i>social distancing</i> .
A28	Batulicin Tanbu, Jl. Kuranji Bumi Datar RT 12	Tidak	Tidak ada yang dapat.	Masyarakat menganggap Covid- 19 adalah penyakit biasa dan tidak mesti dapat bantuan.
A37	RT 1 Desa Pugaan Kalua	Ya	Dapat utamanya janda dan lansia, kecuali PNS	Belum siap <i>New Normal</i> , sekarang aja masih ada tambahan positif Covid-19.
A15	RT 3 Palingkau Lama	Ya	Dapat BST 32 org, sebagian dapat sembako. Dan sebagian lagi masih diusulkan	Belum siap New Normal, masyarakat banyak mengabaikan protokol kesehatan dari pemerintah.
A20	Gunung Makmur Takisung RT 1/04	Ya	Semua dapat kecuali yang mampu dan PNS	Belum siap <i>New Normal</i> . Masyarakat kurang paham bagaimana yang dikehendaki pemerintah.
A41	Citra Berkat Permai Angsau Pelaihari		Hanya 2 orang penerima BST, penduduk rata- rata mampu	Pasar ramai karena keperluan belanja harian, tapi masyarakat kurang sadar akan protokol kesehatan
A22	Telaga Itar RT 1 Kelua	Ya	Sekitar 30 orang	Belum siap <i>New Normal</i> , karena masih banyak masyarakat lain yang kurang taat
A35	Desa Awang Bangkal Barat Karang Intan Kab. Banjar	Ya	Semua dapat kecuali Bansos, BNPT, PKH. Sebagian juga diberi dari dana desa 300 ribu x 3 bulan	Kesadaran pakai masker masih kurang, kebanyakan menganggap perkara sakit biasa saja, demikian juga masalah mati. New Normal dilakukan seiring dengan pengertian masyarakat tentang kesehatan bisa meningkat.
A1	RT 16 Tegalorejo Kelumpang	Ya	Hanya 2 orang dapat BST,	Kesadaran dan kepatuhan masyarakat masih kurang.

	Hilir Kotabaru		sisanya PNS dan dianggap masih mampu	
A6	RT 15 Mekarsari Kab. Batola	Ya	Dapat semua kecuali 5 PNS dan 1 dianggap mampu	Belanja ke pasar merupakan kebutuhan untuk sepekan. <i>New Normal</i> merupakan kesadaran masyarakat untuk bisa taat aturan.
A10	RT 31 Semangat Dalam Batola	Ya	Hanya 7 yang dapat selebihnya sudah dapat bantuan lain yang sudah terdahulu, dan sebagian juga PNS	Belum siap untuk <i>New Normal</i> , masyarakat banyak yang kurang paham akan bahaya Covid-19 dan menganggap biasa saja. Dengan <i>New Normal</i> dikhawatirkan karena mengejar meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi lebih banyak lagi yang kena Covid-19.
A39	Asam2 RT 9 RW 2 Jorong Tala	Ya	35 org dapat BST, selebihnya 11 PKH, dana lain	Warga dapat 600 ribu dan 300 ribu/3 bulan untuk penduduk asli (KTP, KK). Pembiasaan budaya bersih perlu waktu, walaupun sebagian warga sudah punya inisiatif di depan rumah ada fasilitas cuci tangan. <i>New Normal</i> , belum saatnya, karena masih terjadi penambahan penderita Covid-19. Pemahaman <i>New Normal</i> adalah akan bebas tanpa ada protokol khusus, banyak belum paham, apa sebenarnya.
A12	RT 3 Kel. Barabai	Ya	Semua dapat, tapi ada 2 yang mengembalikan, karena merasa cukup mampu.	Masyarakat pergi ke pasar karena persediaan di rumah menipis, namun mereka berdesakan karena suasana pasar sangat ramai. Karena tak ada sanksi yang membuat orang jera tidak patuh

				akan protokol kesehatan.
A11	Desa Pudi RT 3 Kotabaru	Ya	Hanya 4 orang dapat BST	<i>New Normal</i> belum siap, justru dikhawatirkan penderita Covid-19 terus meningkat. Pemahaman masyarakat terhadap pandemik Covid-19, dianggap biasa saja.
A4	Anjir Muara Kota RT 5	Ya	Dapat BST 20 orang, 15 PKH, selebihnya PNS dan mampu	Belum siap, masyarakatnya belum disiplin, dan juga semakin hari masih ada positif baru Covid-19.
A5	RT 17 Anjir Pasar	Ya	Dapat BLT 4, Bantuan ada 2 jenis, Tk 1 dapat 100rb dan Tk 2 250rb+sembako	Belum siap <i>New Normal</i> , masih belum sepenuhnya sadar akan protokol kesehatan.
A18	RT 19 Tanjung Pagar Kota Banjarmasin	Ya	BLT dapat 12 keluarga	Masyarakat tidak dapat kalau dikurung terus menerus. Ada kesempatan, mereka keluar rumah untuk <i>refreshing</i> .
A17	RT 5 Sungai Tabukan, Desa Nelayan	Ya	Semua dapat, kecuali 4 PNS dan 3 PKH	Masyarakat ramai memenuhi keperluan sehari-hari ke pasar. <i>New Normal</i> mestinya diberlakukan ketika masyarakat sudah sadar dan sama-sama menjaga kesehatan sesuai protokol.
A36	RT 2 Tapus Dalam Sungai Pandan	Tidak	97 KK, kecuali 4 PNS, dan 9 PKH, 3 KK mampu	<i>New Normal</i> belum karena tiap hari belum ada tanda2 penurunan penderita Covid-19.
A33	Kotabaru	Tidak	Tidak ada	Masyarakat acuh saja. Belum siap <i>New Normal</i> .
A26	RT 1 Mantuil, Muara Harus Kelua Tabalaong	Ya	24 BST, 3 dari Kabupaten, 3 dari Dana Desa selebihnya PNS, 24 PKH, 14 menolak	Masyarakat setelah diberikan masker gratis, sudah mulai menaati aturan kebersihan, setiap muka rumah ada tempat cuci tangan. Masyarakat. Belum siap dengan <i>New Normal</i> , banyak belum

				patuh, dan masih ada tambahan Covid-19.
A17	RT 1 Terawan	Ya	Semua dapat kecuali 4 PNS	Belum siap, harus ada sosialisasi yang terpadu.
B25	Rt 2 Landasan Ulin Utara Banjar Baru	Ya	Hanya 5 yang dapat, selebihnya dianggap sudah mampu	Belum siap khawatir, justru tambah meningkat masyarakat terinfeksi corona.
B29	Sungai Malang RT 9, Amuntai	Ya	Dapat semua, kecuali 3 PKH dan 11 PNS	Kurang penyuluhan, dan kesadaran masyarakatnya sendiri. Tak paham bahaya besar terhadap Covid-19. Kalau harus <i>New Normal</i> , maka aturan dan sanksi lebih jelas dan sudah tersosialisasi dengan baik.
B21	Pemurus Bumi Lingkar Basirih Rt 4 RW 8	Ya	14 KK dapat, kec. 4 PNS dan 11 PKH	Sebagian sudah bosan di rumah dan perlu keluar untuk mencukupi keperluan sehari-hari.
B28	Jl. Veteran 58 RT4 RW 2, Murung Raya	Ya	Dapat 12 KK, sisanya mampu dan PNS	Belum siap <i>New Normal</i> . Masyarakat perlu diedukasi dan diawasi dengan ketat.
B39	Ds Sangking Baru Kec. Kelumpang Selatan Kotabaru	Ya	15 KK dapat, kecuali 4 PNS, 11 PKH	Belum siap <i>New Normal</i> , sebagian tetap keluar demi keperluan beli sembako, dan sebagainya.
B9	Jl. Ujung Murung Amuntai HSU	Ya	150 KK dapat, selain 20 PKH	Belum siap <i>New Normal</i> , sebagian masih tidak patuh dan masih ada penambahan pasien Covid-19.
B20	RT 2 Jungkal, Lampihong Kab. Balangan	Ya	Dari 32 KK. 13 dapat bantuan Covid-19, selebihnya 6 Bansos, 5 PKH, 2 PNS, 6 mampu.	Kebanyakan belum paham maksud dibantu. Mereka ramai belanja Idul Fitri tak ada hubungan dengan sembako, sakit dikatakan ditentukan Allah, jadi tak perlu dikhawatirkan. Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, mestinya

				ditindak tegas.
B38	RT 7 Tamban Jaya, Tamban Catur	Ya	Semua dapat, kecuali PNS, bidan, guru	Masy. Belum siap, diperlukan kesadaran tinggi untuk mencapai <i>New Normal</i> . Masyarakat diberi duit, tidak paham, sebenarnya mengurangi bekerja di luar untuk cari nafkah. Tapi tetap ramai keluar untuk belanja.
B6	RT 12a Sungai Lulut	Ya	27 KK dapat bantuan, dan 56 KK tidak dapat karena warga pendatang	Kebanyakan masyarakat pedagang kue, sayur, dan warung, serta baju. Sulit berhenti tidak beraktivitas demi ekonomi keluarga. <i>New Normal</i> siap dengan tetap jaga protokol kesehatan, masker, dan cuci tangan. Tapi untuk jaga jarak susah.
B22	Pemangkih Seberang Rt1 RW 1, Lab.Amas Utara, HST	Ya	28 K dapat BST, 69 lainnya tidak karena PNS dan PKH	Kerumunan di pasar akibat belanja, mungkin kurang sosialisasi dan pengawasan aturan. <i>New Normal</i> belum siap kalau masih ada di sekitarnya penambahan Covid-19
B12	Desa Pakan Dalam, Daha Utara, HSS	Ya	Semua dapat, kecuali 16 PKH, 7 mampu, dan 3 PNS	Ada kesempatan jalan-jalan, bosan di rumah dan dapat duit, ke pasar, tapi sebagian tidak pakai protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. <i>New Normal</i> belum siap karena kurang disiplin masyarakat kita.
B1	Kitang RT 2 Tanjung, Tabalong	Ya	Terdapat 12 KK dapat BST, selain PKH dan PNS	Belum cukup sosialisasi, sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk patuh pada aturan /protokol kesehatan dari pemerintah.
B32	Kel. Tumbukan Banyu RT 6 Kandangan	Ya	Semua dapat, kecuali 14 PNS dan 5 PKH	Masyarakat kurang peduli akan anjuran pemerintah, walaupun selalu disampaikan di TV, tapi secara langsung, dirasakan masih

				kurang. Masyarakat dapat duit BST, bukan beli keperluan maka, tapi mereka beli tas, pakaian, dan lain-lain. Gaya hidup masyarakat perlu mendapatkan pembimbingan.
B29	RT 9 Kel. Sungai Malang, Amuntai	Ya	Semua dapat, kecuali 11 PNS dan 3 PKH	Masyarakat belum paham peruntukan bantuan pemerintah, banyak beli pakaian, tas, perabotan rumah. <i>New Normal</i> belum siap, masy. belum sadar bahaya Covid-19.
B24	Mabuun RT 4, Murung Pudak, Tabalong	Ya	Semua dapat, kecuali 2 PNS dan 4 PKH	Warga kurang paham manfaat masker. <i>New Normal</i> harus, terutama untuk bantu ekonomi warga dengan selalu pakai masker dan rajin cuci tangan.
B14	Alalak Tengah RT 9	Ya	Semua dapat, kecuali 1 PNS dan 4 PKH	Warga anggap remeh Covid-19. Tidak takut ramai-ramai ke pasar dan kumpul yang tidak perlu.
B19	RT 6, Kapar, Murung Pudak Tabalong	Ya	Dapat BST 20 orang.	Belum siap <i>New Normal</i> , warga kurang peduli akan protokol kesehatan. Dapat duit merupakan kesempatan untuk belanja ke pasar, walaupun sulit menghindar dari jaga jarak.
B7	Kelurahan Panggung RT 6, Pelaihari	Ya	Hanya 20 yang dapat, selebihnya PNS dan yang mampu	<i>New Normal</i> diperlukan dengan pengawasan yang ketat. <i>New Normal</i> diperlukan dari segi ekonomi, namun dari segi kesehatan, perlu edukasi yang lebih baik.
B8	Komp.Chandra Utama, Perum Permata Indah RT 7 Landasan Ulin Banjarbaru	Ya	Semua dapat, kecuali 18 PNS dan 7 PKH	Kurang sosialisasi, masyarakat abaikan jaga jarak dan masker, juga sebagian tidak sabar. Duit kompensasi BST sebagian tidak tepat guna.

B13	Jl. Ampera Tengah RT 37 no 3, Banjarmasin	Ya	Ada 12 KK dapat, sisanya 2 PNS dan 15 PKH	Masyarakat merasa sangat perlu ke pasar untuk kebutuhan sehari-hari, masalah <i>physical distancing</i> dan masker terkadang dilupakan, karena tidak terbiasa melakukannya.
B35	Kelurahan Panyipatan RT 9 Pelaihari	Ya	Ada 20 bantuan pemerintah, 7 bantuan Pusat, 7 dana desa, 6 dari kabupaten. BST ada 20, sisanya PNS dan mampu.	Masyarakat banyak dapat duit dan ke pasar untuk memenuhi keperluan sehari-hari, selama disuruh di rumah saja. Tapi banyak ceroboh tak paham bahaya Covid-19 yang mungkin bisa menulari, tanpa masker dan jaga jarak, serta tidak selalu cuci tangan.
B16	Jumba RT 4, Amuntai Selatan	Ya	Semua dapat, kecuali PNS dan yang sudah mampu	Warga tak takut ke pasar setelah dapat duit untuk keperluan sembako dan beli masker. Di RT ini belum ada Covid-19
B3	Landasan Ulin RT 2	Ya	BST 11 sesuai kuota, 5 dari APBD.	Warga tetap keluar rumah untuk memenuhi keperluan hidup, jatah diberikan masih kurang, dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah. <i>New Normal</i> diperlukan untuk memenuhi ekonomi.
B13	Jl. Ampera Tengah RT 37 No.3 Banjarmasin	Ya	Dapat 12 KK, selain 2 PNS dan 15 PKH	Sanksi yang kurang tegas, sehingga warga tidak takut keluar rumah tanpa protokol kesehatan.
A28	Jl.Kuranji Desa Sanggadung, Bumi Datar RT 12, Batulicin Tanbu	Tidak	Tida ada dapat. Dianggap Covid-19- adalah penyakit biasa	Masyarakat belum siap dengan <i>New Normal</i> .
A29	RT 2 Desa Muara Barabai, Permata Intan, Murung Raya	Ya	Dapat 10 BST, 89 Dampak Covid-19 dari Bupati.	Sembako sulit, apalagi kalau kapal tidak dibolehkan datang. Harus siap, dengan terapkan disiplin yang ketat.

B18	RT 2 Kompl. Purnama Permai	Ya	Tidak ada yang dapat, dianggap sudah berkecukupan	Masyarakat banyak belum sadar perlunya menjaga jarak untuk menghindari penularan Covid-19. Masyarakat tidak mungkin tak boleh keluar untuk beli keperluan sehari-hari.
-----	----------------------------------	----	---	--

Berbagai istilah yang digunakan pemerintah untuk mencoba bersama-sama masyarakat dalam mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 ini. Namun, dari berbagai istilah yang diberikan oleh pemerintah tidak semuanya bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sebagai contoh untuk sebutan “*New Normal*”, sebagian dipahami dengan “kenormalan baru”, yang semuanya sudah dianggap normal seperti sediakala. Masyarakat boleh berkumpul, dari semula dilarang mengikuti kerumunan orang banyak dan *WFH (Work From Home)*. Mungkin juga karena sudah terlalu banyak istilah, dan belum sepenuhnya mampu memahami suatu istilah, kemudian muncul lagi istilah baru. Sekarang ini, ada lagi istilah AKB (*Adaptasi Kebiasaan Baru*), pemerintah menghendaki adanya perubahan perilaku masyarakat berpindah menjadi kebiasaan baru; selalu pakai masker dimanapun juga, selalu rajin cuci tangan, berusaha untuk tidak banyak bersentuhan dengan barang atau benda termasuk uang tunai, sehingga masyarakat diimbau untuk belanja dan bertransaksi dengan elektronik.

Berikut ini berbagai istilah sejak tanggal 20 Maret sampai keluarnya Keputusan Menkes 13 Juli 2020 dengan nomor HK.01.07/Menkes/413/2020, berhubungan dengan perkembangan dan pencegahan Covid-19, yang tidak semua masyarakat Indonesia mampu memahami dengan berbagai tingkat pengetahuan dan budayanya. Berbagai istilah tersebut antara lain : ODP (*Orang Dalam Pemantauan*), PDP (*Pasien Dalam Pengawasan*), *Suspect*, *Positif*, *Lockdown*, *Social Distancing*, *Physical Distancing*, *Isolasi*, *Karantina*, *Work From Home (WFH)*, *Imported Case*, *Local Transmission*, *Wabah*, *Epidemi*,

Pandemik, *Rapid Test*, Antiseptik, Cairan Desinfektan, OTG (orang tanpa gejala), Kasus *Probable*, *Periksa Real Time*, *Discarded*, *New Normal*, dan Adaptasi Kebiasaan Baru.

PEMBHASAN

Kepatuhan masyarakat akan imbauan pemerintah untuk bisa bersama-sama melawan wabah Covid-19 belum dilaksanakan secara menyeluruh. Terdapat beberapa faktor yang belum mendapat pemahaman yang sama. Kesadaran yang kurang dari masyarakat akan bahaya yang datang dengan cepat dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa virus penyakit ini sangat cepat menjalar kepada manusia dengan berbagai cara dan di berbagai lapisan masyarakat. Berbagai istilah yang kurang dipahami dan tidak semua masyarakat bisa paham dan berpartisipasi untuk menyukseskan program pemerintah tersebut. Berbagai istilah tersebut seolah-olah hanya berlaku bagi petugas kesehatan dan orang yang terlibat dalam Tim Satuan Tugas Covid-19 saja. Kurang terlibatnya dan terbatas ruang waktu bagi tokoh panutan masyarakat, termasuk para ulama besar, untuk bisa ikut terlibat dalam melawan penyebaran Covid-19. Himpitan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap, menyebabkan mereka mengabaikan protokol kesehatan dan lebih mementingkan keperluan dasar untuk bisa bertahan hidup.

Kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19, tidak serta merta dipahami dengan baik. Bahkan seiring dengan cepat dan banyaknya kabar yang disampaikan melalui media sosial, mendapatkan pemahaman yang beragam, sesuai dengan alam pikiran bagi penerima informasi dari media sosial dimaksud. Sebagian menganggap “hoaks” ; sebagian menganggap ini adalah bagian dari bisnis di bidang obat dan kesehatan; sebagian menganggap ini hal biasa dan perkara sehat-sakit-mati seseorang sudah ada ketetapan dari Yang Maha Kuasa sehingga tak perlu berlebihan untuk diwaspadai dan cukup berserah diri saja; sebagian beranggapan bahwa ini peristiwa seperti penyakit terdahulu dan pasti cepat berlalu; sebagian ada yang memang sangat

peduli terhadap kejadian ini sehingga mengajak orang lain untuk bersama-sama waspada, tetapi terkadang dianggap oleh masyarakat lainnya, sebagai sikap yang berlebihan.

Berbagai istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan selanjutnya bersama-sama untuk bisa saling menjaga, memelihara kesehatan diri dan keluarga. Istilah ini tidak merata dipahami oleh masyarakat secara luas. Bahkan karena ketidak-mengertian, menyebabkan masyarakat jadi acuh tak acuh terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Istilah "*New Normal*" dianggap suatu perubahan dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Suatu keadaan yang diciptakan untuk saling jaga jarak sosial dan fisik, serta larangan untuk keluar rumah pada jam malam tertentu, berubah menjadi "*New Normal*", menyebabkan masyarakat menganggap semuanya berubah jadi normal, seperti sediakala. Pemerintah cepat menyadari bahwa pemahaman masyarakat sebagian keliru sehingga istilah "*New Normal*" dirubah dengan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru). Akan tetapi ini juga belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, terbukti dengan penularan Covid-19 semakin bertambah. Belum lagi adanya pro-kontra kebijakan yang memperbolehkan belajar Sekolah Dasar untuk tatap muka di daerah yang dianggap zona hijau, dengan syarat, pemerintah daerah setempat membolehkan.

Kondisi lain disebabkan kurang keterlibatan tokoh panutan masyarakat untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman pada kelompoknya. Di Kalimantan Selatan yang terkenal masyarakat agamis, sangat mengikuti apa yang diimbau oleh tokoh agama. Ketentuan PSBB menyebabkan berbagai pengajian yang banyak memiliki pengikutnya tidak boleh dilaksanakan, tidak bisa melaksanakan pengajian, waktu dan ruang terbatas, sehingga juga terjadi penyumbatan arus komunikasi. Arus komunikasi berupa imbauan pemerintah tidak bisa disampaikan dengan baik oleh para ulama, tidak bisa disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh pengikutnya, sehingga

masyarakat menerjemahkan apa yang mereka dapatkan dari pembicaraan masyarakat, melalui media sosial atau pembicaraan langsung, selanjutnya mendapatkan pemahaman yang beragam dan cenderung dipahami sesuai dengan keperluan dan kepentingan masing-masing. Konsep komunikasi dua tahap (*two step flow of communication*) dari Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet 1944, (Baran : 2011) belum dipahami dengan baik. Mestinya untuk memberikan pemahaman kepada banyak orang, 271 juta rakyat Indonesia, bukan masalah mudah. Kita harus menggunakan *opinion leader* yang bisa mengedukasi *followers* nya yang banyak. Demikian juga untuk mengurangi perlawanan masyarakat terhadap keluarganya yang mau dimakamkan dengan protokol Covid-19, mestinya kita lebih banyak bekerjasama dengan tokoh agama, yang kemungkinan bisa memberikan solusi terbaik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terjadi penolakan; misalnya tokoh agama memberikan pemahaman tentu dengan kerjasama kepada Tim Gusus Tugas untuk bisa memberikan kesempatan pada keluarganya untuk menyalatkan jenazah keluarga dengan jarak tertentu (5-10 meter), demikian juga bisa menyaksikan pemakaman walaupun dari jarak jauh (100-500 meter).

Himpitan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, sangat dirasakan. Mereka dengan berbagai cara untuk bisa mencari celah mencari uang dan keperluan dasar agar bisa bertahan hidup. Ketika diberikan BST (Bantuan Sosial Tunai), mereka serta merta menggunakan uang tersebut dengan berbelanja ke pasar sebagian tanpa memperhatikan jaga jarak fisik dan tidak menggunakan masker. Selebihnya juga masyarakat selalu mencari celah melanggar protokol kesehatan dan menghindari berbagai sanksi yang akan diberikan.

KESIMPULAN

Berbagai komunikasi tidak berjalan dengan lancar antara pemegang kebijakan dengan masyarakatnya. Belum lagi terdapat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah kurang berjalan dengan baik. Sesuai dengan jumlah rakyat Indonesia yang sangat banyak dan tersebar cukup luas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, bahkan sebagian ada yang antipati. Keterlibatan tokoh masyarakat yang memiliki banyak *followers*, kurang terlihat jelas. Kurangnya panutan dan kepercayaan publik.

Kesadaran akan kebersamaan saling menjaga kesehatan dan penyebaran Covid-19 belum merata, apalagi dengan berbagai istilah yang tidak gampang dapat dipahami dengan baik, sehingga dirasakan berat untuk dapat mencapai hasil maksimal dalam menekan laju penyebaran Covid-19 ini. Berbagai istilah yang kurang dipahami, terutama dengan pengaruh meluaskan media sosial sebagian bernada melecehkan upaya pemerintah untuk segera keluar dari pandemik ini.

Pemberian Bantuan Sosial Tunai yang kurang diimbangi dengan penyampaian edukasi pentingnya menjaga protokol kesehatan dan berbagai sanksi, justru menghasilkan keadaan yang kontra-produktif. Program ini, mestinya segera dievaluasi untuk menghasilkan sasaran program yang optimal, diperlukan pemberian pengertian dan kesepahaman untuk bersama-sama saling menjaga, dan nantinya kita punya harapan yang lebih baik, walaupun sementara masih berjangkit Covid-19, seolah-olah terlalu banyak aturan yang harus kita patuhi bersama. Pihak pemerintah harus dipahami oleh masyarakat, merupakan pihak yang selalu memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19>, diakses 2 April 2020 jam 13:02

<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-Covid-1919-sebagai-bencana-nasional>, diakses 28 April 2020 jam 12:01

tribunnews.com. diakses 25 Juli 2020 jam 17:42

Disetujui Kemenkes, Banjarmasin Akan Mulai Terapkan PSBB Awal Ramadhan., diakses 1 Mei 2020, jam 15:31

PSBB di Banjarbaru-Banjar-Batola Serentak Dimulai Sabtu 16 Mei, diakses 19 Mei 2020, jam 18:15

Baran, S.J. (2011). *Theories of mass communication. Introduction to mass communication*. California, Amerika: McGraw Hill.